

MI, 13 APR '18

Hapus Hukuman Mati Jadi Alat Diplomasi

Indonesia akan dinilai percuma memperjuangkan penyelamatan WNI di negara luar jika masih memberlakukan hukuman mati di negeri sendiri.

RICHALDO Y HARIANDJA
richaldo@mediaindonesia.com

PENGHAPUSAN hukuman mati di Indonesia dapat menjadi alat diplomasi efektif bagi pemerintah. Pasalnya, Indonesia dinilai dapat memiliki posisi tawar untuk menyelamatkan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi terpidana mati di luar negeri.

Sejauh ini, terdapat 188 warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi terpidana mati di luar negeri, mayoritas berada di Arab Saudi. Indonesia akan dinilai percuma memperjuangkan penyelamatan WNI di negara luar jika masih memberlakukan hukuman

mati di negeri sendiri.

"Menghapus hukuman mati dapat menjauhkan Indonesia dari tuduhan standar ganda dari negara luar," ucap Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, dalam Media Briefing di kantor Amnesty International Indonesia, Jakarta, kemarin.

Meskipun demikian, ia menilai saat ini ada kesadaran yang tumbuh di tubuh pemerintah dengan menjadikan hukuman mati sebagai hukuman alternatif. Hal itu, dikatakan dia, merupakan suatu terobosan positif.

Menurut catatan Amnesty International Indonesia, Indonesia tidak melakukan eksekusi apa pun pada tahun 2017 setelah memutuskan untuk menunda eksekusi pada 10 terpidana mati pada menit-menit akhir di 2016.

Sementara itu, untuk vonis hukuman mati, sebanyak 47 vonis dijatuhkan pada tahun 2017, jumlah tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan 60 kasus pada 2016. Hingga akhir 2017, terdapat 262 terpidana yang menunggu eksekusi hukuman mati di Indonesia.

"Sudah saatnya bagi Indo-

"Menghapus hukuman mati menjauhkan Indonesia dari tuduhan standar ganda."

Usman Hamid
Direktur Eksekutif
Amnesty International Indonesia

nesia untuk memberlakukan moratorium terhadap semua eksekusi di 2018,"

Meskipun demikian, untuk menghapus aturan hukuman mati secara keseluruhan, Usman menilai hal itu masih sulit. Pasalnya, desakan dari masyarakat dan dukungan politik tidak akan mengizinkan Presiden untuk menghapus hukuman mati.

Tidak efektif

Usman menambahkan penghapusan hukuman mati, terutama untuk para pengedar narkoba, juga dinilai tidak efektif. Berdasarkan catatan Amnesty International Indonesia, masih ada 46.537 kasus narkoba yang

tercatat pada 2017, padahal di tahun 2016 ada eksekusi terhadap 4 terpidana mati karena kasus narkoba.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Ricky Gunawan menambahkan Indonesia seharusnya belajar dari negara lain yang melakukan pendekatan dekriminalisasi dalam penyalahgunaan narkoba. Hal itu, membuat pendekatan penyuluhan dan rehabilitasi dapat menjadi salah satu solusi menyelesaikan kejahatan narkoba yang didorong lewat revisi Undang-undang Narkotika.

"Tapi, jika RKUHP (Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang memasukkan delik narkoba ini disahkan, narkoba akan jadi objek pidana, yang ada kita akan terus mengirimkan putra-putri kita yang salah gunakan (narkoba) ke penjara," terang dia.

Selain itu, aturan hukuman mati ini juga kerap disalahgunakan oknum hukum di Indonesia. Hukuman mati masih dianggap sebagai hukuman instan dalam menyelesaikan kejahatan yang kompleks dan membutuhkan penyelesaian jangka panjang. (P-4)



EKSEKUSI MATI: Direktur LBH Masyarakat Ricky Gunawan (kiri) dan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid berbicara dalam Laporan Statistik Amnesty International tentang Hukuman Mati, di Jakarta, kemarin. Usman menyatakan kecenderungan global dalam pelaksanaan eksekusi hukuman mati menunjukkan tren positif. Artinya sejumlah negara telah menghapus atau tidak melakukan eksekusi mati.